E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2057-2068
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Di Kota Bengkulu Tahun 2020-2024

Media Utami Putri [1], Pakri Fahmi[2], Fitriani Ariska[2]

[1,2,3] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
e-mail: [1]mediautami28@gmail.com, [2]pakrifahmi@yahoo.com,
[3]fitrianiariska@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu periode 2020–2024. Dalam sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan meliputi rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam membiayai pembangunan masih sangat kurang, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 20,48%. Nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 75,23% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 26,79%, yang mengindikasikan rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Kata Kunci: Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian.

Abstract

This study aims to analyze the level of financial independence of Bengkulu City for the period 2020–2024. In a government system that adheres to fiscal decentralization, local governments are expected to have a high level of financial independence as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Local Governments. However, based on data

from the Central Statistics Agency (BPS), the level of financial independence of Bengkulu City is still relatively low. The research method used was quantitative descriptive. The analytical tools used included the regional financial dependency ratio, fiscal decentralization ratio, and regional financial independence ratio. The results of the study show that the financial authority of the Bengkulu City regional government in financing development is still very lacking, as indicated by the average fiscal decentralization ratio of 20.48%. The average value of the regional financial dependency ratio of 75.23% indicates that the Bengkulu City Government is highly dependent on transfer funds from the central government. Meanwhile, the level of financial independence of Bengkulu City is relatively low with an average value of 26.79%, which indicates the region's low ability to independently finance development needs.

Keywords : Decentralization, Dependence, Independence.

LATAR BELAKANG

Dalam era pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengelola anggaran secara efektif, tetapi juga mampu menggali potensi pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen utama penopang keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama dalam menentukan derajat kemandirian suatu daerah dan sumber dana utama dalam pembiayaan belanja daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, meningkatkan pembiayaan daerah, serta memperkecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Kustianingsih et al., 2018). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri (Halim, 2016). Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Suhandak & Triaklasono, 2007).

Secara nasional, tantangan kemandirian fiskal masih menjadi isu utama di Indonesia. Umumnya, kabupaten/kota di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian Konstanse et al. (2020) dan Ullo et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya rasio kemandirian fiskal menyebabkan hubungan pusat dan daerah masih bersifat instruktif, sehingga dominasi pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah masih cukup kuat.

Kota Bengkulu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa, yang seharusnya dapat menjadi sumber utama peningkatan PAD. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Adapun data penerimaan daerah Kota Bengkulu selama tahun anggaran 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 1.1 Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : Data diolah peneliti dari BPS Daerah Kota Bengkulu 2021- 2025

Berdasarkan grafik pendapatan daerah tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa total pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.297.073.339.665,00, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun-tahun selanjutnya total pendapatan daerah kembali meningkat hingga mencapai Rp1.348.525.895.532,00 pada tahun 2024.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif lebih kecil dibandingkan dana transfer, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat perubahan pola fiskal dan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada periode 2020–2024 yang dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan pascapandemi dan penyesuaian fiskal nasional. Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas dan strategi Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi pengaruh

kebijakan fiskal dan realokasi anggaran tersebut terhadap kemampuan Kota Bengkulu dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu selama periode 2020–2024, serta menilai pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan pentingnya kemandirian fiskal sebagai salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi praktis bagi perumusan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademik tetapi juga menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di tingkat pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan keuangan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan di masa mendatang.

Tabel 2. 1 Pola Hubungan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
1.	0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
2.	26 – 50	Rendah	Konsultatif
3.	51 – 75	Sedang	Partisipatif
4.	76 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : Mahmudi, 2019 (Buku Analisi Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta STIM YKPN).

METODE

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu berdasarkan rasio keuangan daerah periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian berupa angka-angka keuangan yang dianalisis menggunakan perhitungan rasio keuangan daerah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder. Data tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Total Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tahun 2020–2024. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Badan Keuangan Daerah Kota Bengkulu, berupa laporan realisasi APBD Kota Bengkulu tahun 2020–2024.
b. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu melalui publikasi tahunan *Kota Bengkulu Dalam Angka*.

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu tahun 2020–2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Pemilihan periode tahun 2020–2024 didasarkan pada ketersediaan data dan relevansinya dalam menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu.

4. Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Oprasional

Variabel	Definisi Oprasional	Hasil Ukur (%)	Skala
Rasio Desentralisasi Fiskal	Rasio Desentralisai Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menggali dan mengelola pendapatan.	1. 0.00 - 10.00 2. 10.01 – 20.00 3. 20.01 – 30.00 4. 30.01 – 40.00 5. 40.01 – 50.00 6. > 50	1. Sangat Kurang 2. Kurang 3. Sedang 4. Cukup 5. Baik 6. Sangat Baik
Rasio Ketergantungan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.	1. 0.00- 10.00 2. 10.01 – 20.00 3. 20.01 – 30.00 4. 30.01 – 40.00 5. 40.01 – 50.00 6. > 50	1. Sangat Rendah 2. Rendah 3. Sedang 4. Cukup 5. Tinggi 6. Sangat Tinggi
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan	1. Instruktif 0 – 25 2. Konsulatif 25 – 50	1. Rendah Sekali 2. Rendah 3. Sedang 4. Tinggi

	kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat.	3. Partisipasi 50 – 75 4. Delegatif 75 – 100

Sumber : Mahmudi, 2019 (Buku Analisi Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta STIM YKPN).

5. Metode Analisa

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Rasio, Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah dan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Menurut Mamudi (2019) :

1). Rasio Desentralisasi Fiskal

$$Rasio\ Desentralisasi\ Fiskal = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{Total\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Penerimaan derajat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD Terhadap TPD (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi, 2019 (Buku Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta STIM YKPN)

2). Rasio Ketergantungan Daerah

$$Rasio\ Ketergantungan = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{Total\ Pendapatan\ Transfer}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Daerah

Presentase Rasio Ketergantungan (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Rendah
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Tinggi
> 50	Sangat Tinggi

Sumber : Mahmudi, 2019 (Buku Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta STIM YKPN)

3). Rasio Kemandirian

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{Transfer\ Pusat + Transfer\ Provinsi}\ x\ 100\%$$

Tabel 3.4 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultif
Sedang	50 – 75	Partisipasi
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Mahmudi, 2019 (Buku Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta STIM YKPN)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal kota Bengkulu

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan kontribusi pendapatan asli dalam pembiayaan urusan pemerintahan. Rasio Derajat Desentralisasi diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah selama tahun anggaran yang sama. Adapun hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Rasio Desentralisasi Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2020-2024 (RP)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2020	233.369.479.183,73	1.297.073.339.665,00	17,99%	Kurang
2021	224.765.681.727,00	1.191.753.364.771,00	18,86%	Kurang
2022	261.289.797.562,00	1.236.508.889.848,00	21,13%	Sedang
2023	290.198.819.118,00	1.266.527.517.553,00	22,91%	Sedang
2024	289.831.884.531,00	1.348.525.895.532,00	21,49%	Sedang
Rata-rata			**20,48%**	**Sedang**

Sumber : Data di olah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rasio desentralisasi keuangan Kota Bengkulu selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah hingga sedang. Pada tahun 2020 rasio desentralisasi tercatat sebesar 17,99% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 18,86%, yang keduanya termasuk dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio desentralisasi meningkat menjadi 21,13%, kemudian mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 22,91%, dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 21,49%. Pada periode 2022–2024, rasio desentralisasi keuangan berada dalam kategori sedang. Secara rata-rata, rasio desentralisasi keuangan Kota Bengkulu selama tahun 2020–2024 sebesar 20,48%, yang menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Bengkulu dalam membiayai pembangunan daerah melalui PAD masih belum optimal, sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bengkulu

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengukur proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah dengan membandingkannya. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada campur tangan keuangan dari pihak luar dalam mengelola urusan pemerintahan. Selama periode 2020-2024, Sebagian besar Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berasal dari pendapatan transfer. Adapun hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bengkulu 2020-2024 (RP)

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Ketergantungan
2020	862.766.913.000,00	1.297.073.339.665,00	66,52%	Sangat Tinggi
2021	920.379.292.794,00	1.191.753.364.771,00	77,23%	Sangat Tinggi
2022	962.649.752.825,00	1.236.508.889.848,00	77,85%	Sangat Tinggi
2023	974.528.698.435,00	1.266.527.517.553,00	76,94%	Sangat Tinggi
2024	1.046.510.475.140,00	1.348.525.895.532,00	77,60%	Sangat Tinggi
Rata-Rata			**75,23%**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Data di olah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Bengkulu selama periode 2020–2024 berada pada tingkat yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan tercatat sebesar 66,52% dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 77,23%. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi 77,85%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 76,94%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 77,60%.

3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Rasio Kemandirian menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya sendiri tanpa mengandalkan intervensi atau bantuan dari pemerintah pusat. lebih tinggi. Rasio Kemandirian dihitung dengan membandingkan total Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Adapun hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bengkulu 2020-2024 (RP)

Tahun	PAD	Transfer Pusat + Transfer Provinsi	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2020	233.369.479.183,73	937.091.470.232,47	24,90%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	224.765.681.727,00	920.379.292.794,00	24,42%	Rendah Sekali	Instruktif

2022	261.289.797.562,00	962.649.752.825,00	27,14%	Rendah	Konsultif
2023	290.198.819.118,00	974.528.698.435,00	29,78%	Rendah	Konsultif
2024	289.831.884.531,00	1.046.510.475.140,00	27,70%	Rendah	Konsultif
Rata-Rata			**26,79%**	**Rendah**	**Konsultif**

Sumber : Data di olah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu selama periode tahun 2020–2024 masih tergolong rendah. Pada tahun 2020 rasio kemandirian tercatat sebesar 24,90% dengan pola hubungan instruktif, yang menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini relatif tidak jauh berbeda pada tahun 2021, di mana rasio kemandirian mengalami sedikit penurunan menjadi 24,42% dan masih berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio kemandirian menjadi 27,14% dan pola hubungan berubah menjadi konsultif, yang mengindikasikan mulai meningkatnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio kemandirian mencapai 29,78%, meskipun masih berada dalam kategori rendah. Namun, pada tahun 2024 rasio kemandirian kembali mengalami penurunan menjadi 27,70%, dengan pola hubungan tetap konsultif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu tahun 2020–2024 masih tergolong rendah dengan rasio kemandirian sebesar 26,79%, rasio desentralisasi fiskal 20,48%, dan rasio ketergantungan keuangan daerah 75,23%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu disarankan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi ekonomi daerah, digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta peningkatan pengelolaan aset daerah guna memperkuat kemandirian fiskal daerah**.**

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. In Educacao e Sociedade (Vol. 1, Issue 1). http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea

.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi.

Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, *5*(2), 1–20. https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/177

Bahl, R. W. (1999). Implementation Rules for Fiscal Decentralization. Khusaini, M. (2006). Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.

Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Daerah.

Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.*

Konstanse, O. K., Nalle, W. F., & Meomanu, A. V. P. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Journal on Education, 5(2), 2721–2728. https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916

Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Siswanto. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 5(1), 54–63. http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pratiwi, R. D. (2022). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *9*.

Putri, F. G., & Sjadili, M. (2013). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *4*.

Rusydi, B. U., Maulia, C. N., & Hasbiullah. (2022). Bulletin of Economic Studies (BEST) PROVINSI SULAWESI SELATAN THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN REGION / CITY OF SOUTH SULAWESI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai h. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan*, *2*, 97–110.

Suhandak, M., & Triaklasono, T. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 8.

Suparto, S. (2017). Implementasi Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, 4.

Ullo, F., Stella Kakisina, C., & Sri Hartati, Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(2), 54–60. https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223.